



LAPORAN

Lokakarya Proyek CoLUPSIA

(Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangement Project)

di Tingkat Propinsi

**“Menakar Pembangunan dalam Konteks Tata Guna Lahan Kolaboratif:
Perkembangan dari 3 Tahun Proyek CoLUPSIA di Kalimantan Barat**



Pontianak, 1 April 2013

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	3
1.3. Hasil yang diharapkan.....	4
2. PROSES WORKSHOP	5
2.1. Kata sambutan.....	5
2.1.1. Sambutan dari Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu.....	5
2.1.2. Sambutan dari CoLUPSIA	5
2.1.3. Sambutan dari Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Barat	6
3. PRESENTASI DAN DISKUSI	8
3.1. Presentasi Sesi 1	8
3.1.1. Pembangunan dalam Konteks Tata Guna Lahan Kolaboratif	8
3.1.2. Paparan Kapuas Hulu.....	9
3.2. Diskusi Sesi 1	11
3.3. Presentasi Sesi 2	13
3.3.1. Proses Persective Analysis (PPA)	14
3.3.2. Modeling dan Analisa Data Spasial.....	15
3.4. Diskusi Sesi 2.....	16
3.5. Presentasi Sesi 3	18
3.5.1. Kajian Ekologi Hutan dan Lingkungan untuk Mendukung Pengelolaan Hutan	18
3.5.2. Legal Aspect of CoLUPSIA, Pre-eliminary Report	18
3.6. Diskusi Sesi 3.....	19
4. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT	28

LAMPIRAN

Lampiran 1. Agenda Kegiatan Workshop	30
Lampiran 2. Daftar Peserta Lokakarya	31

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tantangan perencanaan tata guna lahan yang semakin kompleks perlu mendapat perhatian pengambil kebijakan diantaranya, pengelolaan hutan dimasa lalu telah menyebabkan berkurangnya tutupan hutan sehingga dukungan fungsi ekologis dari hutan ikut menurun. Kedua, kondisi lahan yang dapat difungsikan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, maupun kehutanan luasnya relatif tetap namun kebutuhan terhadap lahan justru semakin meningkat. Hal ini menyebabkan persaingan penggunaan lahan yang apabila tidak dikelola secara baik dapat menyebabkan munculnya konflik penggunaan lahan.

Pembangunan dalam pengertian yang luas menghadapi tantangan berbagai pilihan penggunaan lahan, sehingga tahap perencanaan merupakan tahapan yang penting. Perencanaan tidak hanya melibatkan pemerintah akan tetapi termasuk sektor swasta, masyarakat lokal, kelompok perempuan maupun masyarakat sipil dengan memperhitungkan berbagai aspek baik biofisik, ekonomi, sosial, budaya termasuk hak-hak tradisional masyarakat.

Proyek tata guna lahan kolaboratif (Collaborative Land Use Planning - CoLUPSIA) merupakan kerjasama antara CIRAD France (Agriculture Research and Development), CIFOR (Center for International Forestry Research), TELAPAK, HuMa dan Riak Bumi yang didukung oleh Uni Eropa meliputi dua lokasi kerja yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Maluku Tengah selama empat tahun (2010-2014).

Lokakarya dengan tema “Menakar Pembangunan dalam konteks Tata Guna Lahan Kolaboratif” dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penting antara lain bagaimana mensinergikan pembangunan dan perencanaan tata guna lahan yang kolaboratif?

Lokakarya ini diharapkan menjadi kontribusi CoLUPSIA selama melakukan kegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu antara lain (1) penguatan kelembagaan terkait land use planning, (2) review dan analisis pengelolaan sumber daya alam, (3) membangun kesepakatan land use plan yang melibatkan berbagai pihak berkepentingan, (4) mengembangkan mekanisme pembiayaan pro-poor berbasis konservasi di lokasi pilot, dan (5) penyadaran publik mengenai pentingnya tata guna lahan kolaboratif.

Lokakarya ini diharapkan menghasilkan pemahaman para pihak mengenai sinergi antara pembangunan dan perencanaan tata guna lahan, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di propinsi Kalimantan Barat; serta pilihan-pilihan pembangunan yang ramah ekologi dan social dimasa yang akan datang.

1.2. Tujuan

Tujuan dari workshop ini adalah untuk memaparkan hasil kajian dan kegiatan yang telah dicapai Proyek CoLUPSIA kepada para pihak di tingkat propinsi Kalimantan Barat dan mendiskusikan peluang sinergi dan tindak lanjut berkaitan dengan penatagunaan lahan kolaboratif di Kalimantan Barat

1.3. Hasil yang diharapkan

Workshop ini diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- Para pihak memahami informasi dan hasil-hasil kegiatan proyek CoLUPSIA yang sedang berjalan di Kabupaten Kapuas Hulu
- Para pihak mengadopsi dan menggunakan informasi dan hasil kajian CoLUPSIA sebagai bahan penyusunan kebijakan termasuk pengembangan kapasitas mengenai pentingnya tata guna lahan kolaboratif

2. PROSES WORKSHOP

Kegiatan workshop dimulai dengan pembacaan doa dan diteruskan dengan penjelasan singkat oleh fasilitator workshop (Yayan Indriatmoko) tentang tujuan dilaksanakannya workshop, agenda workshop (lampiran 1), juga partisipan yang terlibat dalam workshop (lampiran 2). Workshop yang dilaksanakan di Hotel Santika pada tanggal 1 April 2013 dihadiri oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perwakilan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

2.1. Kata sambutan

Acara dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan yang dibawakan oleh Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, Programme Team Leader Proyek CoLUPSIA dan Bappeda Propinsi Kalimantan Barat. Penyampaian kata sambutan dari Bappeda Propinsi Kalimantan Barat dibarengi dengan pembukaan workshop secara resmi.

2.1.1. Sambutan dari Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu

Sambutan dari Kepala Bappeda Kapuas Hulu diwakili oleh Y. Anthonius Rawing (Sekretaris Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu) yang dimulai dengan permasalahan terkait dengan tata ruang. Permasalahan tata ruang merupakan masalah yang kompleks (multi sektoral dan multi aktor) dan ini tidaklah mudah untuk diselesaikan. Pemda tidak dapat bekerja sendiri dalam membuat rencana tata ruang ini. Selain itu terdapat pergeseran peran utama dalam penyusunan perencanaan tata ruang yang semula berada di pemerintah ke arah kolaboratif dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat.

Proyek CoLUPSIA sudah berjalan sejak tahun 2010 dan memilih Kabupaten Kapuas Hulu karena banyaknya hutan yang terdapat di kabupaten ini. Kabupaten Kapuas Hulu sendiri telah menyatakan diri sebagai Kabupaten Konservasi di tahun 2003. Komitmen sebagai Kabupaten Konservasi menuntut pembangunan di kabupaten haruslah sejalan dengan semangat konservasi dan keberpihakan pada lingkungan. Namun, selama ini Kabupaten Kapuas Hulu belum mendapat perhatian sepenuhnya terhadap komitmen pembangunan yang berorientasi pada isu konservasi selain dari proyek-proyek konservasi yang melakukan kegiatannya di Kabupaten Kapuas Hulu.

Salah satu proyek yang saat ini masih aktif adalah proyek CoLUPSIA, yang selama ini telah berkontribusi terhadap penyediaan perangkat analisis dan pengayaan pengetahuan terhadap SDM yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga output kegiatan dapat membantu Pemda dalam kegiatan perencanaan daerah. Akhirnya atas nama Pemda Kapuas Hulu, selamat berloka karya. Semoga hasil lokakarya dapat menjadi masukan bagi Pemda Kapuas Hulu dalam melakukan pembangunan.

2.1.2. Sambutan dari CoLUPSIA

Sambutan dibawakan oleh Yves Laumonier (Project Team Leader CoLUPSIA) yang diawali dengan menunjukkan *slide* berisi tentang situasi hutan secara umum yang terdapat di wilayah tropis mengawali sambutan dari Proyek CoLUPSIA, dimana terdapat transisi dari kondisi hutan yang masih utuh, kawasan yang sudah tidak berhutan lagi dan kondisi dimana kawasan menjadi hutan kembali. Kondisi ini terjadi secara global. Hutan di Kalimantan masih banyak berdasarkan peta tutupan lahan pada tahun 2010, terutama di bagian pegunungan. CIRAD

bekerjasama dengan CIFOR yang merupakan lembaga yang bergerak di bidang kehutanan sehingga cukup logis bagi CoLUPSIA untuk memilih kawasan yang masih memiliki hutan yang cukup banyak sehingga Kapuas Hulu dipilih sebagai salah satu lokasi proyek.

Kondisi tutupan hutan di tahun 2010 dipengaruhi oleh dinamika penggunaan lahan di tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibagi menjadi 2 periode besar yakni:

1. Tahun 1990 – 2000

Dalam kurun waktu ini terjadi kegiatan eksploitasi kayu secara illegal di kawasan HPH yang sudah tidak beroperasi lagi. Selain itu, terjadi konversi dari lahan-lahan yang sudah tidak ada kayunya menjadi lahan pertanian.

2. Tahun 2000 – 2010

Periode ini dipenuhi dengan banyak perkembangan hutan tanaman yang ditujukan untuk memenuhi bahan baku industri kertas dan bubur kertas. Selain itu, perkembangan perekonomian mulai mengarah pada pengembangan industri kelapa sawit yang khususnya terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah mengakibatkan banyaknya lahan yang berubah menjadi kebun sawit. Pada masa ini juga terjadi transisi perubahan ekonomi dari yang semula berbasis sungai ke jalan darat.

Perubahan kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan (yang disebut dengan deforestasi dan degradasi) mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya fungsi ekologis yang disediakan oleh hutan. Sedangkan pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap hutan dan SDA yang dihasilkannya. Para ilmuwan memperkirakan deforestasi dan degradasi hutan menghasilkan emisi yang mencapai 20% dari seluruh emisi gas rumah kaca per tahunnya.

Degradasi hutan merupakan fenomena yang terjadi di banyak tempat di dunia, sehingga banyak donor yang bekerja untuk mengatasi masalah ini. Pada saat itu Uni Eropa berpikir bahwa diperlukan perencanaan tata guna lahan untuk mendukung pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Oleh karenanya CIRAD bekerjasama dengan CIFOR, Telapak dan Huma untuk menghasilkan rencana tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang kolaboratif dan adil. Pengurangan laju deforestasi dapat dilakukan melalui: 1) untuk mendorong proses kolaboratif dalam perencanaan, penggunaan lahan, dan pengelolaan SDA; 2) Mendorong pengembangan kelembagaan yang mempromosikan kebijakan dan instrumen terkait lahan dan pengembangan masyarakat; dan 3) Melakukan studi terkait dengan mitigasi kerusakan lingkungan dengan cara mengembangkan mekanisme insentif pembiayaan atas jasa lingkungan. Ketiga hal ini kemudian dijadikan tujuan utama proyek CoLUPSIA yang akan dijelaskan lebih mendetail para presentasi-presentation berikutnya.

Demikianlah sekilas tentang proyek CoLUPSIA dan juga alasan dipilihnya Kapaten Kapuas Hulu sebagai salah satu lokasi kegiatan.

2.1.3. Sambutan dari Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Barat

Sambutan dari Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Barat diwakili oleh Yuslinda dengan *update* informasi yang terkait dengan perencanaan daerah yang dilakukan oleh Bappeda. Hal ini dikarenakan kegiatan proyek ini sesuai dengan program yang dilakukan pemerintah di tingkat provinsi.

Status Rencana Tata Ruang Propinsi (RTRWP) Kalimantan Barat hingga saat ini belum disahkan. RTRWP sudah sampai di Dephut, namun belum mendapat rekomendasi dari Dephut terkait dengan substansi kehutanan.

Ada beberapa hal yang terkait dengan isu tata guna lahan di Propinsi Kalimantan Barat, yakni:

1. RTRWP masih belum disahkan kemungkinan karena kerusakan hutan yang cukup serius yang terjadi tidak hanya di Kalimantan tapi juga di daerah lain sebagaimana yang dijelaskan di presentasi sebelumnya. Sehingga substansi kehutanan dalam RTRWP Kalimantan Barat perlu dibicarakan lebih mendetail.
2. Saat ini Pemerintah Propinsi sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Bappeda merupakan *lead sector* dalam penyusunan dokumen ini. Kegiatan yang ada di kabupaten harus disesuaikan dengan RPJPD. RPJPD dan RPJMD harus sesuai dengan RTRWP dan tentunya RTRWP haruslah mendukung komitmen Presiden untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Menjadi harapan kami, hasil dari kegiatan proyek CoLUPSIA dapat dijadikan masukan bagi penyusunan RPJMD.
3. Terkait dengan penurunan emisi GRK, Pemerintah Propinsi sudah membuat Rencana Aksi Daerah (Renstrada) yang berisi kegiatan yang dapat dilakukan terkait dengan penurunan emisi GRK sampai tahun 2020. Kalimantan Barat termasuk satu dari lima propinsi yang tepat waktu dalam menyusun dan menyerahkan Renstrada. Renstrada ini disahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tahun 2012. Emisi GRK Propinsi Kalimantan Barat saat ini mencapai sekitar 500 Giga ton, yang 93% dari emisinya berasal dari land based sector sedangkan sisa emisinya berasal dari bidang yang lain meliputi transportasi, energi dan sampah.

Kegiatan yang dilakukan oleh CoLUPSIA merupakan implementasi dari kegiatan untuk menurunkan emisi GRK yang selaras dengan komitmen negara kita. Namun, MRV merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam upaya penurunan emisi GRK ini. Saat ini Bappenas sedang mengembangkan metode MRV yang akan membantu untuk menghitung penurunan emisi setiap tahunnya.

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahe Esa, maka dengan ini Lokakarya “Menakar Pembangunan dalam Konteks Tata Guna Lahan Kolaboratif: Perkembangan dari 3 Tahun Proyek CoLUPSIA di Kalimantan Barat” dinyatakan dibuka.

3. PRESENTASI DAN DISKUSI

Presentasi dalam workshop ini dibagi dalam tiga sesi yang berfokus pada: 1) Perencanaan tata ruang yang saat ini berlangsung di tingkat propinsi dan kabupaten, 2) Kegiatan Proyek CoLUPSIA yang terkait dengan tata ruang, dan 3) Hasil-hasil penelitian yang meliputi aspek bio fisik, sosial ekonomi dan legalitas.

3.1. Presentasi Sesi 1

Presentasi di sesi pertama ini lebih difokuskan pada perkembangan terkini tentang rencana tata ruang yang dibawakan oleh Bappeda Propinsi Kalimantan Barat dan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu.

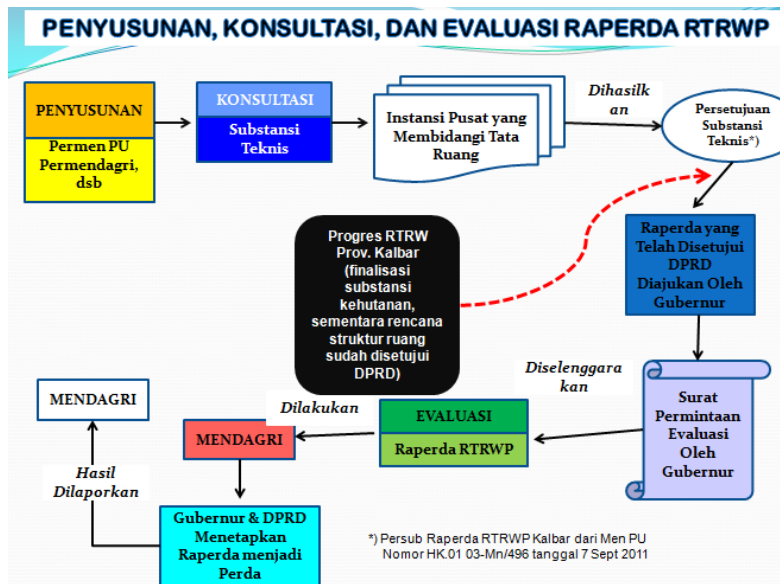
3.1.1. Pembangunan dalam Konteks Tata Guna Lahan Kolaboratif

Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan UU No. 25 tahun 1956 dengan mempunyai luas wilayah 147.867 Km² dengan jumlah penduduk sebesar 4.477.348 jiwa. Terdapat 5 Wilayah Sungai (WS) di Propinsi Kalimantan Barat, yakni WS Sambas, WS Mempawah, WS Kapuas, WS Pawan dan WS Jelai Kedawang. Kabupaten Kapuas Hulu termasuk dalam WS Kapuas dan sudah dibentuk TKPSDA di tahun 2012.

Beberapa isu strategis penataan ruang provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kapuas Hulu, yakni:

1. Rencana Pusat Kegiatan, dimana Kota Putussibau sebagai PKW, Kota Nanga Badau sebagai PKSN, Kota Semitau dan Nanga Tepuai sebagai PKL.
2. Pola Ruang meliputi keberadaan kawasan pemukiman yang berada dalam kawasan hutan/lindung, luasan Kalbar yang menjadi bagian dari *Heart of Borneo* (sekitar 18.2%), kebijakan pengembangan Kawasan Perbatasan Negara, pengembangan kawasan pertambangan, berkurangnya lahan pertanian serta ancaman bencana alam.
3. Kawasan budidaya nasional. Kawasan andalan Kapuas Hulu dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan dan pariwisata.

Proses penyusunan, konsultasi dan evaluasi Raperda RTRWP dapat dilihat pada gambar dibawah.



Pengajuan RTRWP sudah dilakukan di tahun 2011 dan sampai sekarang draf masih berada di Deputi untuk finalisasi substansi kehutanan.

3.1.2. Paparan Kapuas Hulu

Kami menyambut baik kehadiran CoLUPSIA di Kapuas Hulu sebagai mitra strategis dalam membantu kebijakan tata ruang di Kabupaten. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kondisi di Kapuas Hulu termasuk yang menjadi tema yang menjadi fokus lokakarya hari ini yakni tentang tata guna lahan.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kawasan seluas 31.162 Km² (± 21.23% dari luas total Kalimantan Barat). Sebanyak 51,21% dari wilayah Kabupaten merupakan kawasan lindung atau konservasi. Kabupaten ini berbatasan dengan Malaysia di sebelah utara, dengan Propinsi Kalimantan Tengah di sebelah selatan, dan dengan Kalimantan Timur dan Kalteng di sebelah timur. Populasi kabupaten Kapuas Hulu mencapai ± 230.000 jiwa (2011) yang terdapat di sekitar 278 desa.

Untuk RTRW sampai saat ini Perdanya masih di DPRD Kapuas Hulu masih dibahas dan belum selesai. Kita dihadapkan oleh berbagai isu yang bersifat global seperti pemanasan global dan perubahan iklim, maupun isu yang bersifat strategis nasional seperti degradasi ekosistem di taman nasional (Danau Sentarum dan Betung Kerihun), pengembangan dan investasi infrastruktur wilayah serta perubahan pola ruang. Beberapa fakta tentang Kabupaten Kapuas Hulu:

1. Memiliki 6 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
2. Mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Konservasi dengan 51.21% merupakan kawasan lindung dan konservasi dengan harapan terciptanya *benefit transfer* terhadap kawasan yang berkomitmen melakukan pembangunannya tanpa merusak lingkungan lingkungan. Seperti *oxygen fee*. Namun, hingga saat ini hal tersebut belum terwujud. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh beberapa NGO yang terkait dengan hal ini yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, tanpa melibatkan Pemda.

3. Merupakan kabupaten tertinggal dengan 237 desa tertinggal dari total 278 desa yang ada di kabupaten ini.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki nilai strategis sebagai: 1) kawasan yang memiliki mega biodiversity; 2) sebagai ‘tower air’ bagi daerah yang terdapat di hilir Sungai Kapuas; dan 3) terdapat sumber daya yang cukup berpotensi untuk modal pembangunan di Kalbar.

Pola Ruang Kawasan Hutan di Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari taman nasional, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi konversi, hutan produksi dan areal penggunaan lain. Luas hutan di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai $\pm 80\%$ dari luas wilayah, sedangkan sisanya (20%) merupakan kawasan non hutan yang meliputi Area Peruntukan Lain (untuk budi daa pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan dan infrastruktur) serta tubuh air.

Berdasarkan konsep arahan pembangunan Kapuas Hulu (2011-2031), kegiatan utama yakni mengembangkan pariwisata di kawasan Kapuas Hulu. Sesuai dengan kondisi alaminya, dimana Kapuas Hulu memiliki banyak hutan maka pengembangan pariwisatanya diarahkan ke ekowisata. Selain itu, Danau sentarum sebagai salah satu taman nasional yang ada di Kapuas Hulu juga diakui sebagai *Ramsar site* yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Kegiatan lainnya di sektor kehutanan, pertanian, perikanan diatur sedemikian rupa untuk mendukung kegiatan pariwisata yang berkelanjutan.

Fokus penataan ruang Kapuas Hulu meliputi penguatan kelembagaan (yakni memaksimalkan fungsi dan peran BKPRD) dan juga regulasi (yakni mendorong percepatan PerdaRTRW Kapuas Hulu) sebagai landasan hukum pelaksanaan penataan ruang di daerah.

Beberapa tantangan pemanfaatan ruang Kapuas Hulu antara lain:

1. Belum diperdaknya RTRW Provinsi Kalimantan Barat membuat pola ruang kabupaten belum bisa diidentifikasi dengan jelas.
2. Belum di Perpreskan-nya beberapa kawasan yang masuk dalam RTRW Nasional misalnya Kawasan Jantung Kalimantan (HOB), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perbatasan Negara dipulau Kalimantan (KASABA), dll, yang sudah pasti menjadi kendala bagi Kabupaten dalam menentukan arah pemanfaatan ruangnya

Pemda Kapuas Hulu berharap dengan adanya komitmen untuk melakukan pembangunan yang ramah lingkungan, maka sudah sepantasnya apresiasi diberikan kepada masyarakat Kapuas Hulu melalui:

1. Prioritas dalam pelaksanaan program-program maupun kegiatan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat berupa pembangunan infrastruktur.
2. Skema-skema insentif, maupun penambahan keuangan daerah.
3. Kemudahan memperoleh pendanaan program-program Khusus melalui Dana Alokasi Khusus

Terkait dengan Proyek Tata Guna Lahan Kolaboratif di Kapuas Hulu, Pemda menyadari bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah telah terjadi pergeseran dalam pelaku utama kegiatan yakni dari pemerintah ke arah kolaborasi aktif/pelibatan aktif stakeholder yang relevan. Selain itu, Pemda menyadari adanya keterbatasan dalam hal

pendanaan dan juga minimnya SDM yang dimiliki untuk dapat melakukan peranannya secara optimal.

Oleh karenanya, Pemda Kapuas Hulu menyambut baik setiap inisiasi kerjasama dari lembaga-lembaga konservasi yang memiliki tujuan memajukan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan mensejahterakan masyarakatnya. Kerjasama dengan CoLUPSIA dari tahun 2010 merupakan salah satu contohnya yang menitikberatkan pada kegiatan Tata Guna Lahan Kolaboratif.

3.2. Diskusi Sesi 1

Pertanyaan:

Markus Kelambu (Perwakilan dari PPA)

Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan:

1. Pembangunan di KH khususnya DAS Kapuas. DAS Kapuas merupakan wilayah strategis nasional sehingga ada kebijakan yang tidak boleh diambil oleh daerah, teristimewa yang terkait dengan penggunaan sungai. Sangatlah disayangkan bahwa alokasi APBD 1 (untuk kegiatan skala besar tidak dapat diarahkan ke DAS Kapuas dan terus diarahkan ke daerah Ketapang.
2. Tanggal 24 kemarin saya dari TNDS dan mendapatkan informasi bahwa di daerah Sungai Pelaik terjadi penyitaan *chainsaw* masyarakat oleh aparat polisi hutan. Padahal yang mereka lakukan hanyalah untuk meningkatkan produksi madu mereka. Mungkin staf dari Dishut dapat mengecek kebenaran informasi ini.
3. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah yang sangat luas sehingga sulit untuk dipantau. Sudah saatnya kini saya rasa daerah tersebut dimekarkan supaya pemantauan yang lebih baik dapat dilakukan.

Yohanes Entungan (Perwakilan masyarakat Desa Seriang, Badau)

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya terkait dengan presentasi yang dibawakan sebelumnya, yakni:

1. Melihat kondisi yang ada yakni adanya perbedaan pola pikir dan cara pandang para aparatur pemerintah (unsur eksekutif) dan anggota dewan (unsur legislatif) dalam perencanaan tata ruang maka dapat diprediksi akan banyak konflik yang terjadi di daerah Badau dalam 5-6 tahun mendatang.
2. Saya agak khawatir dengan kegiatan Malaysia akhir-akhir ini yang merintis wilayah disekitar perbatasan. Apakah tidak ada aturan khusus tentang batas minimum pembersihan lahan dari batas negara? Karena saya melihat batas rintisan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia sudah sangat dekat dengan batas negara. Sejauh ini tidak ada itikad baik dari pemerintah kita untuk memantau hal ini padahal rintisan yang dilakukan sudah sampai di Bukit Pan yang masuk berdekatan dengan Sungai Seliang yang alirannya mengarah ke Sungai Kapuas. Hilangnya tanaman di Bukit Pan

akan mengakibatkan erosi yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pendangkalan sungai. Selain itu kawasan Bukit Pan ini memiliki potensi untuk dijadikan daerah wisata, yang jika dilihat sekarang bagian bukitnya seolah masuk ke dalam kawasan Malaysia.

3. Akses jalan menuju perbatasan tidak baik, sedangkan kondisi jalan di Malaysia yang menuju perbatasan sangat baik. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada upaya pengamanan daerah perbatasan.

Kinasih Citra Arumi (BPDAS Kapuas)

1. Sampai saat ini Rencana Pengelolaan DAS Kapuas Terpadu sedang disusun. Prosesnya memang lama karena meliputi daerah yang luas yakni 8 Kabupaten dan 1 kota. Apa harapan Pemda Kapuas Hulu terkait dengan mekanisme insentif dan disinsentif sebagai kawasan hulu dari DAS Kapuas?
2. Presentasi Pak Ervan menjelaskan jaringan jalan Propinsi. Pembangunan yang ada saat ini sepertinya difokuskan ke jaringan jalan darat. Dalam presentasi yang dibawakan oleh Pak Yves tadi juga disebutkan bahwa ada transisi ekonomi dari sungai ke darat yang juga berpengaruh pada perilaku. Apakah ada keinginan untuk meningkatkan transportasi sungai pada saat ini?

Luther (Ketua Adat Kecamatan Badau)

1. Menjadi harapan kami masyarakat di perbatasan supaya daerah kami cepat dimekarkan dan kami ingin hal ini cepat direalisasikan.
2. Tentang tata ruang istimewa yang terkait dengan perkebunan. Saya diajak diskusi di awal akan dilaksanakannya pembukaan kebun dimana pada diskusi tersebut disepakati bahwa akan ada jarak antara kebun dengan sungai. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, jarak antara kebun dan sungai kurang dari 50 cm. Apakah tidak ada staff dari pemerintah yang mengecek realisasi dari setiap rencana pembukaan kebun di lapangan?

Jawaban:

Y. Anthonius Rawing, SE, M.Si (Sekretaris Bappeda Kapuas Hulu)

1. Tentang insentif dan disinsentif masih merupakan wacana yang sering kali didiskusikan. Tentu kami berharap agar ada skema insentif untuk daerah hulu. Skemanya dapat berupa dana segar atau program pembangunan yang berasal dari daerah hilir seperti Sintang dan Sanggau. Harapan kami skema ini dapat diatur dalam MoU antara kawasan hulu dan hilir. Tentang sanksi terhadap pelanggaran, kami

berharap adanya UU untuk memayungi hal ini sehingga terdapat sanksi terhadap hal-hal yang sudah disepakati.

2. Tentang pemekaran daerah Kapuas Hulu. Sudah menjadi keinginan masyarakat banyak jika kawasan ini dimekarkan mengingat terlalu besarnya wilayah. Saat ini sedang diajukan usulan pemekaran dua daerah yakni Sentarum dan Benua Lanjak. Semoga jawaban dapat diterima dalam waktu dekat tentang diterima atau tidaknya usulan ini.

Ervan (Bappeda Propinsi Kalimantan Barat)

1. Tentang komentar dari Pak Markus lebih bersifat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dinas PU. Ada aturan yang mengatur tentang kewenangan untuk melakukan kegiatan, seperti untuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemkab, Pemprov ataupun yang langsung ditangani oleh Pemerintah Pusat. Jika tidak mengacu pada aturan ini, maka tentunya kegiatan dan pelaksana kegiatan akan diperiksa oleh KPK. Namun, aturan yang berlaku saat ini mensyaratkan adanya peluang lain yang dapat dilakukan untuk melakukan kegiatan di Kabupaten. Dewan dapat mengajukan usulan tentang bantuan yang diarahkan untuk kegiatan tertentu yang memang dirasa penting untuk masyarakat di daerah tersebut.
2. Penetapan Danau Sentarum sebagai Taman Nasional didasarkan pada SK Menhut yang mengacu pada usulan dari daerah. Saya rasa, mungkin tentang insiden penyitaan *chainsaw* masyarakat dapat dibicarakan ke instansi yang bersangkutan.
3. Tentang kondisi di Badau. Saya ingin menginformasikan tentang alokasi APBN tahun ini yang sebesar Rp. 1,7 T untuk 5 lokasi yang ada di Badau. Tapi, memang tidak semua kegiatan dapat dilakukan sekaligus mengingat adanya prioritas kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing daerah. Tentang pariwisata, kemarin saya melihat liputan di Metro tentang betapa kayanya keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Kalbar yang terletak di ruas jalan yang menghubungkan Putussibau dan Kaltim. Jika saja kita dapat mengembangkan pariwisata dari potensi ini seperti yang ada di negara-negara lain maka ini akan sangat bagus sekali.
4. Pengaturan transportasi sungai sudah dilimpahkan oleh pemerintah ke pihak swasta. Intervensi oleh pemerintah yakni terkait dengan penyediaan dramaga, sedangkan pihak swasta akan mengatur tentang penyediaan kapal, alat keselamatan dan kelengkapan lainnya.

Ada aturan tentang pembukaan kebun dan juga sepadan sungai. Aturannya sudah jelas tidak memperbolehkan hal ini tapi seperti yang Bapak Luther katakan dalam pelaksanaannya banyak kasus dimana hal ini tidak dilakukan.

3.3. Presentasi Sesi 2

Presentasi di sesi kedua ini difokuskan pada penjelasan tentang kegiatan Participatory Persective Analysis (PPA) dan juga Modeling dan Analisa Data Spasial yang sudah dilakukan oleh Proyek CoLUPSIA dalam 3 tahun terakhir.

3.3.1. Proses Persective Analysis (PPA)

Beberapa persoalan di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang sudah disampaikan pada presentasi sebelumnya yakni persoalan alokasi lahan dan infrastruktur menjadi latar belakang kegiatan membangun kesepakatan tentang pembangunan Kapuas Hulu masa depan (2010-2030). Pendekatan yang digunakan untuk kegiatan ini adalah Participatory Persective Analysis (PPA) yang dikembangkan oleh CIRAD untuk membangun visi bersama dengan melibatkan beberapa pihak (*expert groups*) dari Pemda, masyarakat, kelompok adat, sektor swasta dan LSM.

Langkah-langkah dalam PPA meliputi:

1. Medefinisikan batasan sistem
2. Identifikasi variabel
3. Mendefinisikan variabel
4. Analisis pengaruh timbal balik
5. Identifikasi dan pemilihan variabel kunci
6. Mendefinisikan keadaan variabel kunci
7. Pengembangan skenario
8. Rencana tindak lanjut dari skenario

Perkembangan pelaksanaan kegiatan PPA di Kabupaten Kapuas Hulu meliputi seri lokakarya PPA (Mei – Juli 2011), konsultasi publik dan diseminasi hasil di kecamatan (Desember 2011), konsultasi publik dan diseminasi hasil di kabupaten (April 2012) dan penyusunan usulan rencana aksi (2011-2012).

Hasil dari lokakarya PPA yakni teridentifikasi 50 faktor dengan 6 faktor kunci, yang meliputi kebijakan Pemda, penggunaan teknologi, hukum adat dan kearifan lokal, pola pikir, partisipasi serta pendidikan dan keterampilan. Dalam proses ini pihak dari CoLUPSIA lebih berperan sebagai fasilitator sedangkan hasil dari kegiatan merupakan keinginan dari masyarakat.

Ada 4 skenario (gambaran kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan) yang dihasilkan dari kegiatan ini, antara lain:

1. Skenario 1. Langkah Serampak
Skenario ini menggambarkan situasi dimana kebijakan yang berlaku berpihak pada masyarakat dimana masyarakat dilibatkan dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring kegiatan, terdapat sinergi antara hukum nasional dan hukum adat serta terbukanya akses terhadap pendidikan.
2. Skenario 2. Lempar Koin Sembunyi Tangan
Suatu kondisi dimana kebijakan pembangunan hanya mengakomodir kepentingan pihak tertentu, hukum nasional berlaku secara luas tanpa memperhatikan hukum adat, serta penggunaan lahan yang tidak arif sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.
3. Skenario 3. Menulang Emas Mendapat Batu
Pada skenario ini terjadi konflik di masyarakat yang semakin meningkat sebagai akibat dari tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, terjadinya konflik dalam penggunaan lahan karena lembaga adat lemah dan masyarakat adat terpecah belah.

4. Skenario 4. Makan Tuba Buah

Skenario ini menggambarkan situasi dimana pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena prioritas kebijakan yang berubah-ubah dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam penggunaan lahan dan pembangunan.

Skenario yang ingin dicapai oleh masyarakat atau yang ideal yakni skenario 1 (Langkah Serampak). Untuk itu terdapat beberapa kesepakatan rencana tindak yang perlu dilakukan demi tercapainya skenario tersebut. Beberapa kesepakatan tersebut mencakup program rancang ulang peruntukan lahan, penguatan kolaborasi antar komponen pelaku pembangunan (Pemda, masyarakat dan swasta), program pengakuan hak masyarakat adat di wilayah adat dan program pemilihan komoditas yang ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

3.3.2. Modeling dan Analisa Data Spasial

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2011-2030 menggunakan skala 1:250.000. Ada tiga komponen untuk tata guna lahan di Indonesia, yakni:

- Penutupan lahan
- Kesesuaian lahan
- Status lahan

Tata guna lahan dapat diimplementasikan jika status lahan jelas bagi semua pihak. Namun, sebagaimana yang kita ketahui saat ini RTRWP belum difinalisasi sehingga status lahan yang berlaku sampai sekarang masih berdasarkan SK 259/Kpts-II/2000.

Skala merupakan kelemahan dalam pemetaan dan data untuk perencanaan spasial. Data spasial yang digunakan tidak cukup detail (1:250.000) untuk pelaksanaan Tata Guna Lahan di tingkat Kabupaten atau Kecamatan. Akibatnya, terdapat tingkat kesalahan yang tinggi saat peta ini diperbesar untuk digunakan di lapangan. Data spasial yang tidak akurat ini menyebabkan alokasi zonasi di lapangan menjadi tidak sesuai dengan topografi, hidrografi ataupun tutupan lahan yang ada di lapangan. Selain itu, lokasi batas juga menjadi tidak jelas dan tidak diketahui oleh masyarakat. Pada akhirnya, status hukumnya juga menjadi tidak jelas.

Peta kawasan hutan (skala 1:250.000) jika di overlay dengan peta topografi (skala 1:50.000) akan menunjukkan beberapa masalah batas yang kurang sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Dalam penentuan skor hutan, Dephut mengeluarkan index sesuai dengan tingkat kelerengan, erodibilitas tanah dan intensitas curah hujan. Index ini untuk kemudian dikalikan dengan nilai baku yang untuk tingkat kelerengan yakni 20, untuk tingkat erodibilitas yakni 15 dan untuk tingkat intensitas curah hujan yakni 10. Jumlah total dari elemen perhitungan untuk skor hutan ini yang kemudian dikenal dengan skor hutan. Skor hutan inilah yang menjadi dasar penetapan kategori hutan, yakni skor hutan dengan nilai >175 ditetapkan sebagai hutan lindung, skor hutan dengan nilai diantara 125-175 ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas dan skor hutan dengan nilai <125 ditetapkan sebagai hutan produksi biasa.

Penggunaan skor hutan dalam perencanaan tata guna lahan detail di tingkat kabupaten memiliki keterbatasan dalam hal :

1. Skor kelereng yang tidak sesuai untuk pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) atau pertanian. Ada perbedaan kelas lereng antara bidang di Departemen Kehutanan sendiri (Baplan dan BRLKT) dan instansi lainnya yang mengurus pengelolaan lahan (misalnya PPTA dan Departemen Pertanian)
2. Skor tanah hanya menunjukkan tingkat erodibilitas. Skor ini digunakan pada tingkat nasional, tetapi tidak sesuai dengan kondisi lokal dan jika digunakan peta skala besar.
3. Skor curah hujan hanya didasarkan pada asumsi bahwa curah hujan tinggi berakibat pada erosi yang tinggi, tapi stasiun pengukuran lokal jumlahnya sangat sedikit.

Dalam penyusunan revisi tata guna lahan yang dilakukan oleh CoLUPSIA, definisi skor hutan yang digunakan tetap mengacu pada definisi dari Departemen Kehutanan namun dengan skala yang lebih besar. Kelereng menggunakan DEM dengan peta topografi skala 1:50.000 dari Bakosurtanal; erodibilitas tanah menggunakan peta geologi, land unit dan expertise; intensitas curah hujan menggunakan peta bioiklim yang didapat dari *Fontanel and Chantefort* dan *worldclim database*.

Terdapat perbedaan batas kawasan antara batas yang dibuat oleh Dephut dengan batas yang diusulkan untuk direvisi. Perbedaan ini terjadi akibat perbedaan skala peta yang digunakan untuk menganalisa data spasial.

Dapat disimpulkan bahwa Rencana Tata Guna Lahan dan beberapa zonasi tidak dapat dilaksanakan sebelum ada Peta Kawasan Hutan dan Perairan yang akurat, dengan skala yang lebih besar; revisi peta kawasan hutan harus disetujui (rapat Komite Pengerah CoLUPSIA dan SK Bupati tentang Komite Perencanaan Tata Guna Lahan Kapuas Hulu). Dalam dua tahun terakhir, proyek CoLUPSIA sudah mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung revisi yang didasarkan pada data ekologi, biologi, sosial ekonomi dan budaya.

3.4. Diskusi Sesi 2

Pertanyaan:

Amri (WWF)

1. Rencana tata ruang mensyaratkan adanya rencana rinci yang meliputi rencana mendetail dan juga Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang terdiri atas KSK koridor, KSK ekowisata dan KSK agropolitan. Bagaimana orientasi Pemkab Kapuas Hulu untuk pengembangan KSK Agropolitan?
2. Apakah ada langkah strategis Proyek CoLUPSIA untuk memasukkan hasil kegiatannya dalam tata ruang Kabupaten?

Eko Darmawan (FFI Kapuas Hulu)

1. Bagaimana capaian proyek di tingkat desa?
2. Bagaimana dengan capaian proyek ini di tingkat kabupaten? Misalnya bagaimana supaya hasil proyek ini muncul di RPJMD atau minimal di Musrembang desa?
3. Saat penyusunan struktur tata ruang di tahun 2010/2011, ada pertemuan antara Pemda dan juga 11 NGO yang beraktivitas di Kabupaten Kapuas Hulu. Saat itu, setiap NGO

mempresentasikan kegiatan mereka sehingga dapat dilakukan sinergisitas dari kegiatan yang ada saat ini mengingat setiap NGO memiliki keterbatasan. Seperti FFI saat ini hanya berfokus pada dua kegiatan yakni hutan desa (membantu pembuatan tata batas administratif dari 5 desa) dan juga restorasi ekosistem. Bagaimana dengan kelanjutan dari pertemuan ini, mengingat sebelumnya sudah direncanakan untuk pertemuan lanjutan namun hingga kini belum ada realisasinya.

Jawaban:

Bayuni Shantiko (CoLUPSIA)

Proyek CoLUPSIA bekerja di Desa Keluin dan Desa Nanga Dua dengan melakukan beberapa kajian erosi dan juga dampak illegal logging di masa lampau. Selain itu di Desa Keluin, kita juga sedang merencanakan pengembangan energi bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat yakni dengan menggunakan energi dari air (*micro hydro*). Di tingkat Kabupaten yakni dengan memberikan revisi peta tata guna lahan sebagai rekomendasi untuk digunakan dalam proses selanjutnya. Informasi yang disajikan dalam usulan revisi tata ruang ini sudah mendetail sehingga diharapkan perencanaan kawasan dapat menjadi lebih baik.

Yves Laumonier (Project Team Leader Proyek CoLUPSIA)

1. CoLUPSIA tidak akan fokus ke KSK Agropolitan karena saat ini proyek sedang fokus ke revisi tata ruang. Hasil dari analisa tata ruang ini dapat digunakan untuk menunjukkan kawasan mana yang cocok dikembangkan sebagai KSK Agropolitan. Kami adalah proyek yang berfokus pada penelitian, kami akan merekomendasikan sesuatu jika ada hasil dari penelitian yang kami anggap bagus untuk mendukung kegiatan di *site* tempat kami beraktivitas.
2. Proyek untuk seluruh Kabupaten ada 5 *sites* yang dipilih karena terdapat keunikan di daerah tersebut. Proyek CoLUPSIA belum fokus ke arah *community development* karena memang saat ini belum saatnya untuk mengarah ke *community development*.
3. Pertemuan dengan NGO memang penting untuk dilakukan secara berkala tapi hasilnya bisa jadi tidak efektif untuk mendorong rencana tindak lanjutnya. Pendekatan dengan menggunakan metode PPA dapat diadopsi untuk mendorong grup-grup yang terlibat dalam merencanakan aktivitas kegiatan dan juga monitoringnya.

Y. Anthonius Rawing, SE, M.Si (Sekretaris Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu)

1. KSK ditetapkan berdasarkan potensi kewilayahan yang diharapkan dapat cepat tumbuh dibandingkan dengan kawasan yang lainnya. Namun, perlu adanya pembenahan terhadap infrastruktur di KSK supaya tujuan dari penetapan kawasan ini dapat tercapai secara optimal.

2. *Meeting* dengan NGO sedianya memang akan dilakukan, namun yang menjadi kendala adalah mencocokkan waktu meeting yang pas dengan semua SKPD untuk hadir. *Meeting* seperti ini tentunya akan memberi nilai tambah dari kegiatan yang diusung oleh masing-masing NGO. Pemda sendiri merasa bahwa NGO merupakan mitra yang diperlukan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.

3.5. Presentasi Sesi 3

Presentasi di sesi ketiga berisi tentang kegiatan penelitian biofisik dan legalitas serta pengumpulan data sosial ekonomi di desa-desa yang ada di *pilot sites* Proyek CoLUPSIA di Kabupaten Kapuas Hulu.

3.5.1. Kajian Ekologi Hutan dan Lingkungan untuk Mendukung Pengelolaan Hutan

Data yang sudah dikumpulkan sejauh ini adalah survei sosial ekonomi dan kepemilikan lahan (dilakukan di 65 desa), studi ekologi di 12 plot hutan permanen dan 2 plot kebun campuran. Pengamatan hidrologi DAS dilakukan di DAS Leboyan dan Embaloh dengan menaruh stasiun pengamatan di hulu, tengah dan hilir sungai dan memfokuskan pada pemantauan data muka air.

Selain itu, dilakukan juga penelitian untuk struktur, biomasa dan keanekaragaman tumbuhan. Plot yang dibuat yakni berukuran 4-6 ha dengan mengumpulkan data terkait dengan pemetaan pohon, diameter, tinggi pohon total dan bebas cabang, proyeksi kanopi, profil tegakan hutan, bentuk kehidupan vegetasi dan koleksi herbarium.

Dari hasil pengukuran, terlihat bahwa sebaran diameter pohon berbeda di hutan, hutan bekas tebangan, karet dan ladang dengan sebaran diameter pohon paling besar di hutan primer dan yang paling kecil di hutan bekas tebangan. Pemantauan erosi juga dilakukan di plot standar dengan kelerengan 9%. Lahan bekas ladang cepat ditumbuhi oleh tanaman penutup lahan sehingga mengurangi tingkat erosi. Perubahan lahan juga berakibat pada menurunnya kandungan karbon tanah, dimana karbon tanah terbesar hilang saat hutan dikonversi menjadi kabun karet.

Data yang tersedia saat ini dari Proyek CoLUPSIA dapat digunakan dalam pengelolaan lahan dengan unit pengelolaan DAS. Adapun keuntungan menggunakan DAS sebagai unit pengelolaan adalah DAS memiliki bentukan bentang alam yang tetap sehingga dengan mudah dapat dijadikan patokan dan dengan mudah dimengerti oleh semua pihak.

Maka dapat saya simpulkan bahwa kajian ekologis sangat vital dalam menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang terkait dengan tata guna lahan.

3.5.2. Legal Aspect of CoLUPSIA, Pre-eliminary Report

Dalam kolaborasi ini Huma mendapatkan mandat untuk melihat aspek legal dari penataan ruang terkait dengan partisipasi masyarakat. Proses penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Peninjauan terhadap beberapa kebijakan seperti UU Kehutanan, UU HAM, UU konservasi, UU Lingkungan, UU rencana keruangan, UU pemerintahan daerah, peraturan pemerintah dan keputusan menteri kehutanan.

2. Survey lapangan yakni dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data dari staf yang bekerja di Kabupaten Kapuas Hulu seperti Dinas Kehutanan, Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Desa dan juga NGO lokal.

Hasil temuan dari penelitian yang dilakukan:

1. Pengakuan terhadap masyarakat adat berbeda dalam peraturan perundangan terkait:
 - UU Kehutanan
 - UU Penataan Ruang dan PP No. 26 tahun 2008
 - UU Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Aturan tentang kehutanan tidak mengatur mengenai pendaftaran hak, hanya pemberian ijin penggunaan kawasan. Dapat disimpulkan bahwa hutan adat belum mendapat pengakuan secara legal dari kementerian.
3. Penataan ruang membuka kesempatan terhadap partisipasi masyarakat tapi prosesnya tidak operasional dan penetapannya *top-down*. Prosesnya tidak operasional karena tidak mengatur bagaimana masyarakat melakukan partisipasi dan bagaimana proses pengajuan usulannya.
4. BKPRD sebagai pemegang peran sentral dalam penataan ruang daerah *cross-sector*, masih terkendala sejumlah masalah yakni lemahnya koordinasi, minimnya sumber pendanaan, kurang legitimasi, ego sektoral dan juga *unmeaningful public participation*.
5. Legalitas dan batas lahan yang belum jelas di lapangan, dimana:
 - Terdapat 78 desa dari total 278 desa berada dalam kawasan hutan
 - Pemetaan hanya dapat dilakukan di 10 desa untuk tahun anggaran 2012
 - Batas perkebunan sering melampaui kawasan, bahkan taman nasional
 - Pengelolaan hutan oleh masyarakat adat belum diakui

3.6. Diskusi Sesi 3

Pertanyaan:

Rusdi (BPKH III)

Hasil penelitian dari CoLUPSIA ini jika bisa diberikan datanya, dapat menjadi dasar pembuatan delinisi baru saat dilakukan tata batas dalam pengukuhan kawasan. Dari presentasi yang sudah dibawakan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa kegiatan ini sudah melibatkan masyarakat dan unsur lainnya (kolaboratif). Kunci utamadalam penataan batas yakni penerimaan oleh masyarakat sekitar kawasan yang akan ditata batasnya. Tahun kemarin pihak BPKH ditolak oleh masyarakat saat akan melakukan tata batas yang saat itu dijadikan tambang emas oleh masyarakat padahal berdasarkan keterangan, kawasan tersebut masuk dalam kategori Hutan Lindung. Namun, karena adanya penolakan dari masyarakat, maka tidak dilakukan tata batas pada segmen tersebut.

Jawaban:

Yves Laumonier (Project Team Leader Proyek CoLUPSIA)

Silakan untuk memakai data yang ada di CoLUPSIA. Terkait dengan *capacity building*, CoLUPSIA sudah memberikan training kepada staf Bappeda untuk mengolah data satelit yang kita miliki. Kami merasa hal ini masih kurang, sehingga di masa yang akan datang, rencananya akan dilakukan training lanjutan sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan monitoring kawasan.

Jika instansi terkait setuju dengan usulan revisi tata batas yang diajukan oleh CoLUPSIA, maka usulan revisi ini dapat dilanjutkan untuk dibawa ke masyarakat sehingga dapat disetujui oleh mereka.

Selama ini masyarakat hanya mengerti kalau kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung tidak boleh diambil kayunya atau dengan kata lain tidak boleh dilakukan kegiatan apapun di kawasan tersebut. Mungkin sudah saatnya status hutan lindung diubah, yang memungkinkan untuk dilakukan pengambilan kayunya namun dengan kuota tertentu.

Pertanyaan:

Sugyantoro Tri P. (BKSDA Kalbar)

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam menggunakan data *remote sensing* yakni tidak semua instansi punya *concern* yang sama dalam penggunaannya. Hal ini lebih disebabkan karena kurangnya *resources* yang dimiliki baik dana maupun SDM. Masalah dana dan SDM mungkin dapat disupport oleh lembaga lain. Interpretasi terhadap data *remote sensing* juga berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain mengakibatkan berbedanya peta yang dihasilkan oleh setiap instansi. Hal ini tentunya berakibat pada ketidaksesuaian peruntukan lahan diantara berbagai instansi saat dilakukan overlay pada peta-peta yang dihasilkan instansi tersebut.

Jawaban:

Yves Laumonier (Project Team Leader Proyek CoLUPSIA)

Terjadi perubahan pada beberapa tahun terakhir tentang penggunaan data remote sensing. Kini setiap instansi memiliki GIS Section. Saat CoLUPSIA memberikan training, staf yang terlibat mengerti dengan materi yang disampaikan. Namun, perlu diingat bahwa saat diskusi dengan masyarakat, diperlukan peta dengan skala yang lebih detail. Data satelit memang mahal karena itu perlu adanya *sharing* data antar lembaga.

Terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi, terdapat beberapa zona di taman nasional. *Buffer zone* yang ditetapkan selama ini tidak memperhatikan keberadaan masyarakat dalam kawasan tersebut. Hal ini sering kali didiskusikan di CIFOR dan ICRAF tentang bagaimana membuat konsep *buffer zone* yang lebih dapat memberikan manfaat dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Pertanyaan:

Amri (WWF)

Untuk metodologi dalam pengolahan data *remote sensing*. Apakah dalam pembuatan peta land cover menggunakan data time series?. Penggunaan data time series memungkinkan kita melihat trend penggunaan lahan di masa lalu dan membuat proyeksi penggunaan lahan di masa depan.

Matheus Pilin (PPSDAK Pancur Kasih)

Pancur Kasih mulai beraktivitas di Kalbar sejak tahun 1995 dan sejauh ini sudah melakukan pemetaan partisipatif di 362 kampung. Peran yang diambil Pancur Kasih sejauh ini adalah memfasilitasi kegiatan sedangkan pemetaannya dilakukan oleh masyarakat.

Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan:

1. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki sekitar 20% kawasan non hutan (atau APL/perkebunan). Kedepannya akan terjadi masalah akses lahan oleh masyarakat jika membandingkan kawasan ini dengan jumlah penduduk yang ada di Kapuas Hulu.
2. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak pihak menginginkan supaya proses kebijakan tata ruang dipercepat, padahal masih banyak terdapat permasalahan di daerah yang belum diselesaikan hingga saat ini. Saya merasa permasalahan inilah yang sepatutnya diselesaikan terlebih dahulu baru tata ruang dapat disahkan.
3. Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi musti punya terobosan kebijakan baru untuk melakukan pembangunan di daerahnya. Apa yang akan dilakukan oleh Pemda terkait dengan hal ini?
4. Hasil penelitian dari CoLUPSIA sangat menarik. Apakah CoLUPSIA akan menggunakan data-data yang bagus ini untuk advokasi? Jika advokasi tidak menjadi mandat dari CoLUPSIA, apa strategi yang akan diambil untuk menggunakan data-data ini sebagai materi advokasi?
5. Pancur Kasih memiliki kegiatan terkait tata ruang di Sanggau terkait dengan UU tata ruang pasal 65 yakni mengenai partisipasi masyarakat. Kegiatan di Kapuas Hulu perlu melibatkan Bupati secara langsung sehingga dapat dipastikan semua SKPD akan hadir dalam setiap kegiatan. Seperti yang saat ini dilakukan Pancur Kasih di Sanggau, dimana keterlibatan Pemda sudah dituangkan dalam draft MoU.

Jalung (Lanting Borneo)

1. Saya pernah terlibat dalam proses penyusunan tata guna lahan yakni pemetaan di Embaloh Hulu, Jongkong dan Nanga Betung. Saya merasa pemahaman masyarakat sangat kurang tentang fungsi hutan lindung, kawasan lindung serta peran dan hak masyarakat di kawasan tersebut.

2. Peta penunjukkan yang dibuat oleh pemerintah terkait KPH meliputi 3 wilayah Kecamatan di daerah Embaloh yakni kecamatan Putussibau Utara, Embaloh Hulu dan Lanjak. Sedangkan di wilayah tersebut terdapat banyak sekali desa dan lahan yang sudah digunakan masyarakat seperti kebun karet dan juga tembawang mereka. Bagaimana mekanisme pengakuan pengelolaan lahan masyarakat dengan proses tata guna lahan yang dibuat oleh pemerintah?

Jawaban:

Yves Laumonier (Project Team Leader Proyek CoLUPSIA)

1. CoLUPSIA memiliki data series dari tahun 1973 sampai 2011. Menjadi tujuan kami untuk mengumpulkan data series sehingga kami dapat mengerti sejarah perubahan lahan di *site* kami. Cukup menarik kalau melihat kondisi hutan di Kalbar di tahun 1973 dimana hutannya sudah tidak banyak. Tapi, di bagian Kapuas Hulu agak berbeda, dimana hutan masih bagus karena tingkat deforestasi yang tidak tinggi.
2. Tentang pemetaan partisipatif. Kelemahan proyek-proyek seperti proyek CoLUPSIA adalah kita diberi dana untuk kerja sampai 3 atau 4 tahun tapi belum tahu apakah proyek akan dilanjutkan atau ada proyek baru. Pemetaan partisipatif perlu waktu yang sangat lama untuk dilaksanakan. Jika memang ada pemetaan partisipatif di Kapuas Hulu yang sudah dilakukan, jika memungkinkan hasilnya didiskusikan dengan masyarakat. Akan sangat bagus sekali jika hasil dari diskusi ini dapat diintegrasikan dengan usulan revisi kita.
3. Saya setuju dengan jangan tergesa-gesanya kita untuk mensahkan RTRWP. Sebaiknya digunakan skala yang lebih besar untuk penentuan alokasi kawasannya sehingga tidak dilakukan revisi yang berulang-ulang di masa yang akan datang.
4. Tentang advokasi, kami akan melakukan advokasi bersama dengan mitra kami yakni Telapak dan Huma. Menurut kami yang terpenting juga adalah membawa usulan revisi ini ke Jakarta di akhir proyek kami.

Pertanyaan:

Eko Darmawan (FFI Kapuas Hulu)

1. Hasil penelitian akan lebih bermanfaat bagi banyak pihak jika CoLUPSIA bersedia memberikan data yang sudah dikumpulkan ke instansi yang memerlukan. Namun, perlu diingat data ini bersifat multi tafsir, menjadi harapan saya data-data ini tidak hanya diberikan begitu saja tapi juga disertai dengan informasi yang mendukung lainnya.
2. Hasil kajian oleh CoLUPSIA ini sangat membantu Pemda. Andai saja data dan informasi ini tersedia di tahun 2011, tentunya akan sangat membantu sekali dalam penyusunan RTRWP.

Alexander Rombonang (Disbudpar Kabupaten Kapuas Hulu)

Saya sangat menghargai hasil penelitian CoLUPSIA ini. Saya melihat disini ada perwakilan dari masyarakat. Sayang rasanya kita mengundang mereka jauh-jauh tapi mereka tidak bisa terlibat sepenuhnya di forum ini. Saya melihat di agenda acara hari ini kita akan membahas rencana tindak lanjut di akhir lokakarya. Saran saya kita langsung ke acara itu saja, mari menggali apa yang menjadi harapan masyarakat ini dan apa yang bisa diakomodir oleh Proyek CoLUPSIA. Banyak pihak, termasuk pemerintah, lembaga dan investor yang melupakan masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Pada waktu yang tersisa ini, mari kita manfaatkan dengan seoptimal mungkin sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga perwakilan masyarakat ini saat pulang ke desanya, ada pengetahuan yang bisa dibagikan ke warga yang lain.

Luther (Ketua Adat Kecamatan Badau)

1. Tata batas ini penting bagi masyarakat dan pemerintah. Seperti yang terjadi saat ini dimana banyak sengketa terkait batas wilayah. Tentunya penataan batas ini diharapkan melibatkan masyarakat sehingga konflik dimasa depan dapat diminimalisir.
2. Masyarakat adat ada di Kalbar dan adat dipegang sangat kuat sehingga diharapkan bagi mereka yang beraktivitas di Kalbar dapat memperhatikan hal ini.

Jawaban:

Fasilitator (Yayan Indriatmoko)

Mohon maaf jika acara hari ini tidak dimengerti sepenuhnya oleh beberapa peserta lokakarya. Menjadi tantangan besar bagi kami peneliti untuk dapat menerjemahkan hasil studi kami ke bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh banyak orang. Kami sudah mengusahakan untuk bekerja bersama lembaga yang bernama Telapak untuk menghasilkan produk-produk yang dapat mencapai khalayak lebih luas dengan bahasa yang tidak ilmiah. Namun, saat ini produk tersebut masih belum selesai.

Pertanyaan:

Matheus Pilin (PPSDAK Pancur Kasih)

1. RUU tentang masyarakat adat sedang dibahas saat ini. Kita tahu bahwa aspek legal yang ada saat ini belum memberi dukungan secara konkrit kepada masyarakat adat. Diperlukan terobosan-terobosan hukum di Kapuas Hulu, misalkan dalam bentuk SK dari Pemda.

2. Sering kali dalam penelitian yang kita lakukan, masyarakat kita lihat sebagai objek padahal mereka seharusnya dipandang sebagai pelaku. Masyarakatlah yang lebih mengerti tentang desa mereka, tentang sejarah perkembangannya. Sangatlah penting untuk mengapresiasi pengetahuan masyarakat.

Fauzi (Dinas Naker Trans Kalbar)

Sekedar sharing tentang kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas transmigrasi. Dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, kami senantiasa melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengerti seluk beluk tentang desa mereka baik itu lokasi dan juga tapal batasnya. Jika tanggapan masyarakat positif terhadap kegiatan yang akan kami lakukan, barulah kami mengajukan usulan kegiatan ke Pemerintah Pusat dan sejauh ini kegiatan kami lancar di lapangan karena mendapat dukungan dan kejelasan dari masyarakat.

Sumiati (BPDAS Kapuas)

1. Hasil proyek CoLUPSIA ini memiliki nilai yang tidak terhitung khususnya bagi Dephut. Info tentang tutupan lahan diperlukan untuk pengajuan usulan hutan kemasyarakatan/hutan desa. Memang menjadi tugas dasar kami untuk mendampingi masyarakat dalam mengusulkan kawasan-kawasan yang diharapkan menjadi hutan kemasyarakatan/hutan desa ini. Kami merasa kegiatan CoLUPSIA merupakan bantuan atau masukan yang sangat bagus bagi kami.
2. Menanggapi pernyataan Bapak Fauzi tentang pelibatan masyarakat. Saya rasa hasil dari kegiatan CoLUPSIA selama 3 tahun ini sudah menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan hal yang serupa dengan dinas transmigrasi. Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh CoLUPSIA.

Markus Kelambu (Perwakilan dari PPA)

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat adat, yang dipertahankan dengan perang (pertumpahan darah) di masa lalu. Sampai sekarang kita bisa melihat bahwa masyarakat adat tetap mempertahankan tanda-tanda perjanjian yang dibuat dimasa lalu seperti tempayan sehingga masyarakat masa kini pun taat terhadap isi perjanjian tersebut. Saya rasa pemetaan perlu dilanjutkan dengan berdiskusi atau melibatkan masyarakat.

Alexander Rombonang (Disbudpar Kabupaten Kapuas Hulu)

1. NGO harus memperkuat advokasi ke masyarakat dan bukannya ke pemerintah karena pemerintah sudah memiliki birokrasi yang jelas. Sebagai contoh kegiatan yang didampingi oleh Eko, dapat dilihat dari beberapa usulan HKM yang sudah didaftarkan berapa yang dikabulkan?
Maka saran saya kepada proyek-proyek yang memiliki mandat advokasi ke masyarakat, supaya mereka lebih fokus untuk membuat masyarakat mengerti tentang

hak dan kewajibannya sehingga masyarakat dapat menjadi mitra diskusi yang sejajar dengan pemerintah. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, mereka tahu apa yang dapat mereka lakukan selain melakukan demo.

2. Saya merasa pemetaan sangat itu penting, tapi apakah ini sudah menyentuh kepentingan masyarakat seperti adanya indikasi kawasan yang merupakan kawasan yang penting untuk masyarakat seperti bekas kampung ataupun tembawai mereka. Ada hutan-hutan tertentu yang berdasarkan kesepakatan masyarakat yang tidak boleh digunakan. Hal seperti ini tidak ada di dalam aturan negara, sehingga kawasan ini menjadi hutan milik negara, padahal hutan itu sudah dijaga oleh masyarakat yang hidup selama beberapa generasi di sekitar kawasan tersebut.
3. Kegiatan untuk masyarakat sebaiknya lebih ditujukan pada program pemberdayaan masyarakat.

Luther (Ketua Adat Kecamatan Badau)

Kami masyarakat banyak yang tidak mengerti tentang tata ruang jika tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena ini kami mohon supaya kami terus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini.

Yohanes Entungan (Perwakilan masyarakat Desa Seriang, Badau)

1. Tata batas menjadi penting bagi tata ruang karenanya hal ini haruslah jelas bagi semua pihak
2. Ada kawasan yang sudah diplotkan oleh masyarakat yang sekarang menjadi kebun kelapa sawit. Sebenarnya apa peran yang dapat dilakukan masyarakat dalam hal ini? Bahkan untuk supir diambil dari pihak aparat.

Jawaban:

Yves Laumonier (Project Team Leader Proyek CoLUPSIA)

Kami memiliki kegiatan yang detail terkait dengan aspek sosial ekonomi, namun sangat disayangkan waktu saat ini tidak cukup untuk mempresentasikannya. Kami menganggap masyarakat adalah bagian yang penting dalam kegiatan kami, karenanya kami melibatkan mereka dan juga pemerintah sebagai pihak yang sejajar dalam proses PPA. Dalam melakukan penelitian kami di lapangan, kami sering mendapatkan masukan dari masyarakat. Kami sangat menghargai itu dan kami mau belajar dari masyarakat tentang daerah mereka dan juga *traditional ecological knowledge* mereka. Ini bukanlah workshop final, mungkin kita perlu workshop lain yang berfokus dengan masyarakat. Sejak awal, kami melibatkan masyarakat dalam penelitian kami sehingga mereka mengerti pekerjaan kami di desa mereka.

Tanah adat adalah sesuatu yang kami pandang juga sangat penting. Seperti di site kami yang lain, di Maluku, ada beberapa tanah adat yang sulit sekali dipetakan sehingga diperlukan pembicaraan yang serius tentang hal ini dengan instansi terkait.

Kalau kita bisa mengembangkan kemitraan dengan Pemda dan masyarakat untuk proyek CoLUPSIA. Karenanya sekarang kami mau identifikasi untuk setiap lokasi, masyarakat lokal menginginkan apa dari Proyek ini.

Pertanyaan:

Valentinus Heri (Riak Bumi)

1. Dari awal, Riak Bumi tertarik berkolaborasi dengan proyek CoLUPSIA karena kami merasa penelitian sangatlah penting dalam mengarahkan kebijakan dimana saat kita berdiskusi dengan para pengambil kebijakan kita memerlukan basis penelitian yang dapat dimengerti oleh banyak pihak.
2. Yang saya sukai dari awal proyek ini adalah fokus kegiatan yang berdasarkan atas keinginan masyarakat. Saya selalu menekankan ke proyek CoLUPSIA supaya setiap hasil penelitian yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
3. Ada kekhawatiran saya untuk melibatkan masyarakat di workshop ini. Namun, yang paling penting menurut saya adalah masyarakat dilibatkan dari awal kegiatan baik di tingkat kabupaten maupun propinsi. Adapun, pemilihan site dalam proyek CoLUPSIA lebih disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh proyek. Semoga kegiatan CoLUPSIA di site tersebut dapat menjadi contoh bagi wilayah-wilayah yang lainnya.

Matheus Pilin (PPSDAK Pancur Kasih)

1. Perlu dilakukan identifikasi target advokasi sebelum menggunakan hasil penelitian untuk advokasi. Untuk tingkat kabupaten, saya mengusulkan supaya ada terobosan-terobosan hukum yang terkait dengan pengakuan masyarakat adat.
2. Ada banyak intervensi dari berbagai lembaga/NGO dan juga sektor pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu. Model yang terjadi saat ini adalah kegiatan-kegiatan ini masih bersifat parsial sehingga saya merasa perlu ada yang menjadi konsolidator atau penghubung dari inisiatif-inisiatif yang ada saat ini dan sebaiknya yang menjadi konsolidator itu berasal dari unsur pemerintah.
3. Saya setuju dengan Heri, penelitian yang dilakukan hendaknya memberi manfaat nyata untuk masyarakat sekitarnya.

Kinasih Citra Arumi (BPDAS Kapuas)

Saya melihat bahwa adanya aktivitas timbal balik yang terjadi dalam unit pengelolaan DAS dan hasil penelitian yang detail dari CoLUPSIA ini menjadi masukan yang bagus dalam pengelolaan DAS. Bagaimana kira-kira menyederhanakan tentang sudut pandang pengelolaan DAS ini sehingga masyarakat dapat mudah memahaminya?

Eko Darmawan (FFI Kapuas Hulu)

Ada rencana CoLUPSIA akan berkantor di Putussibau. Selama ini dalam pandangan saya, kantor FFI sudah menjadi sentra kegiatan teman-teman NGO yang beraktivitas di Kapuas Hulu dan besar harapan saya jika CIFOR juga memposisikan diri seperti mereka. Menjadi harapan saya juga, personel yang ditempatkan di kantor di Putussibau dapat *stand by* di sana.

4. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Kegiatan Proyek CoLUPSIA di Kabupaten Kapuas Hulu mendapat respon yang baik dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat. Banyak instansi pemerintah dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat yang tertarik dengan hasil temuan Proyek CoLUPSIA dan berharap agar mereka dapat memiliki akses terhadap data tersebut. Proyek CoLUPSIA terbuka terhadap pihak lain yang ingin menggunakan data dari kegiatan-kegiatannya.

Beberapa saran dan masukan untuk Proyek CoLUPSIA yakni adanya harapan dari pihak masyarakat supaya terus dilibatkan di kegiatan-kegiatan lain tidak hanya di Proyek CoLUPSIA, usulan untuk memperkuat kegiatan terkait dengan pendampingan, pemberdayaan dan advokasi masyarakat selain penelitian, memperkuat hasil pemetaan saat ini dengan memasukkan aspek budaya dan masyarakat didalamnya. Selain itu juga terdapat usulan supaya Pemda dapat menentukan instansi tertentu sebagai konsolidator atas beragam inisiatif yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat disinergikan satu dengan yang lainnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Agenda Kegiatan Workshop

Waktu	Acara
08.00 – 9.00	Registrasi
09.00 – 9.15	Pembukaan dan Doa
09.15 – 09.25	Sambutan dari Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu Oleh Y. Anthonius Rawing
09.25 – 09.35	Sambutan dari CoLUPSIA Project Team Leader Oleh Yves Laumonier
09.35 – 09.45	Sambutan dan Pembukaan oleh Bappeda Propinsi Kalimantan Barat Oleh Yuslinda
09.45 – 10.00	Rehat Kopi
10.00 – 10.15	Presentasi dari Bappeda Propinsi Kalimantan Barat Oleh Ervan
10.15 – 10.30	Presentasi dari Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu Oleh Y. Anthonius Rawing
10.30 – 10.45	Tanya Jawab
10.45 – 11.00	Presentasi dari CoLUPSIA tentang Participatory Persective Analysis (PPA) Oleh Bayuni Shantiko
11.00 – 11.15	Presentasi dari CoLUPSIA tentang Modeling dan Analisa Data Spasial Oleh Yves Laumonier
11.15 – 12.00	Tanya Jawab
12.00 – 13.00	Rehat Makan Siang
13.00 – 13.15	Presentasi dari CoLUPSIA tentang Kajian Ekologi Hutan dan Lingkungan untuk Mendukung Pengelolaan Hutan Oleh Imam Basuki
13.15 – 13.30	Presentasi dari CoLUPSIA tentang Studi Sosial Ekonomi Oleh Bayuni Shantiko
13.30 – 13.45	Presentasi CoLUPSIA tentang Legal Aspect of CoLUPSIA, Pre- eliminatory Report Oleh Widiyanto
13.45 – 14.15	Tanya Jawab
14.15 – 15.00	Diskusi Rencana Tindak Lanjut
15.00 – 15.10	Penutup dan Doa

Lampiran 2. Daftar Peserta Lokakarya

No.	Nama	Instansi	No. HP
1.	Luther	Ketua Adat Badau	081345133678
2.	Yohanes Entungan	Tokoh Masyarakat Seriang	082154800956
3.	Markus Kelambu	PPA	081522696200
4.	Yunita Kancak	Kelompok 7 Dara	085750039374
5.	Siska	Kelompok 7 Dara	085750516541
6.	Eko Darmawan	FFI – Kapuas Hulu	084522788862
7.	M. Effendi	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	081352049455
8.	Sugyantoro Tri P.	BKSDA Kalbar	081352357004
9.	Y. Anthonius Rawing	Bappeda Kapuas Hulu	082148000108
10.	Jabun	Lanjak Kapuas Hulu	081328798778
11.	Matheus Pilin	PPSDAK Pancur Kasih	08125741173
12.	Kinasih Citra A.	BPDAS Kapuas	081353771280
13.	Sumiati	BPDAS Kapuas	08129526830
14.	Alexander R.	Disbudpar	081649235222
15.	Syafarudin	Pertanian Provinsi Kalbar	081345009500
16.	Yuslinda	Bappeda Provinsi Kalbar	082155557003
17.	M. Syamsuri	Peruasi	081345277288
18.	Rusdi	BPKH III	085245401533
19.	Medi. M.	Disperindag	085754226910
20.	Ajaris		
21.	Choirunnisyah	BP3AKB	
22.	Tagam Manak	Disperta	
23.	Rizal	Mongabay	08115717778
24.	Andy M. Kadhafi	BBTNBK	085213869210
25.	Ismanto	BBTNBK	08124268802
26.	Amri	WWF	0811576299
27.	Bambang S.	Distamben	081286746160
28.	Wiwid	Huma	087881431952
29.	Fauzi	Disnaker Trans Kalbar	085245499080
30.	Ervan	Bappeda	
31.	Firanda	LPS Air	085387197742
32.	Antonius	WWF Pontianak	085245324409
33.	Anton P. Widjaya	Walhi Kalbar	0811574476
34.	Valentinus Heri	Riak Bumi	
35.	Yves Laumonier	CoLUPSIA	
36.	Imam Basuki	CoLUPSIA	
37.	Yayan Indriatmoko	CoLUPSIA	
38.	Bayuni Shantiko	CoLUPSIA	
39.	Nicolas Labriere	CoLUPSIA	
40.	Alfa Ratu Simarankir	CoLUPSIA	